

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Uji Kualitas Instrumen dan Data

##### 1. Uji Statistik Deskriptif Demografi Responden

Penelitian ini mengambil sampel Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang berbentuk kantor, badan dan dinas yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 3 kantor, 10 badan dan 62 dinas dengan peta distribusi yang terlihat dalam tabel 4.1 :

**Tabel 4.1**  
**Data Penyebaran Kuesioner**

No.	Nama Kota / Kabupaten	Kuesioner Yang Dibagikan	Kuesioner Yang Kembali
1.	Kota Yogyakarta	45	42
2.	Kabupaten Sleman	45	45
3.	Kabupaten Bantul	45	45
4.	Kabupaten Gunung Kidul	45	39
5.	Kabupaten Kulon Progo	45	42
<b>Total</b>		<b>225</b>	<b>213</b>

Sumber : Data Primer

Kuesioner yang disebar sebanyak **225** dan kuisisioner yang kembali sebanyak **213** kuisisioner. Gambar data sampel dapat dilihat pada tabel 4.2 :

**Tabel 4.2**  
**Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang dikirim	225	100%
Kuesioner yang kembali	213	95%
Kuesioner yang tidak kembali	12	5%
Kuesioner yang dapat kembali dan diolah	210	93%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	3	1%

Sumber : Data Primer

Berdasar tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa dari 225 kuesioner yang disebar berhasil kembali sebanyak 213 kuesioner. Sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 12 kuesioner. Kuesioner yang layak digunakan untuk analisis sebanyak 210 kuesioner dan terdapat 3 kuesioner yang tidak dapat digunakan untuk analisis karena tidak diisi secara lengkap.

Karakteristik responden menampilkan identitas responden seperti usia, jenis kelamin, jenjang pendidikan terakhir dan jabatan. Identitas dari penelitian ini antara lain nama, usia, jenis kelamin, jabatan dan masa bekerja di Organisasi Perangkat Daerah. Deskripsi karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 4.3 :

**Tabel 4.3**  
**Data Statistik Karakteristik Responden**

<b>Keterangan</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Jenis Kelamin	Jumlah Responden :	210	
	▪ Laki-laki	79	38%
	▪ Perempuan	131	62%
Usia	Jumlah Responden :	210	
	▪ < 30 Tahun	24	11%
	▪ 31-35 Tahun	83	40%
	▪ 36-40 Tahun	68	32%
	▪ > 40 Tahun	35	17%
Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden :	210	
	▪ Diploma	44	21%
	▪ S1	135	64%
	▪ S2	31	15%
Jabatan di OPD	Jumlah Responden :	210	
	▪ Kepala Dinas/Badan/Kantor	23	11%
	▪ Sekretaris Dinas/Badan/Kantor	78	37%
	▪ Bendahara Dinas/Badan/Kantor	102	49%
	▪ Kepala Sub Keuangan	7	3%
Masa Bekerja	Jumlah Responden:	210	
	▪ 1-10 Tahun	113	54%
	▪ 11-20 Tahun	90	43%
	▪ 21-30 Tahun	7	3%
	▪ 31-40 Tahun	0	0%

Sumber : Data Primer

Berdasar tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 131 atau sebesar 62%. Jumlah responden yang memiliki usia 31-35 tahun berjumlah 83 responden atau sebesar 40%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak memiliki usia antara 31-35 tahun. Responden dengan pendidikan terakhir S1 berjumlah 135 responden atau sebesar 64% sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak merupakan lulusan S1.

Jabatan responden sebagai bendahara dinas/badan/kantor berjumlah 102 responden atau sebesar 49% sehingga dapat disimpulkan bahwa jabatan responden rata-rata adalah bendahara dinas/badan/kantor. Masa bekerja responden di Organisasi Perangkat Daerah antara 1-10 tahun berjumlah 113 responden atau sebesar 54% sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak merupakan pejabat yang memiliki masa bekerja di Organisasi Perangkat Daerah selama 1-10 tahun.

## 2. Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.4 :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	Toritis		Aktual	
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean
Inventarisasi Aset	7-35	21	24-35	29,69
Sistem Pengendalian Internal	8-40	24	26-40	33,22
Kompetensi Sumber Daya Manusia	8-40	24	18-40	31,32
Pemanfaatan Teknologi Informasi	9-45	27	27-45	37,72
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	5-25	15	13-25	20,93
Akuntabilitas	6-30	18	18-30	24,62
Transparansi	8-40	24	24-40	31,52

Variabel	Teoritis		Aktual	
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean
Kualitas Pelaporan Keuangan	11-55	33	34-55	45,83

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Inventarisasi Aset

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa inventarisasi aset memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 7-35 dengan rata-rata (mean) teoritis sebesar 21. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu sebesar 24-35 dengan rata-rata (mean) aktual sebesar 29,69. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata inventarisasi aset yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi.

b. Sistem Pengendalian Internal

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 8-40 dengan rata-rata (mean) teoritis sebesar 24. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu sebesar 26-40 dengan rata-rata (mean) aktual sebesar 33,22. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata sistem pengendalian internal yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi.

c. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 8-40 dengan rata-rata (mean) teoritis sebesar 24. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu sebesar 18-40 dengan rata-rata (mean) aktual sebesar 31,32. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kompetensi sumber daya manusia yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 9-45 dengan rata-rata (mean) teoritis sebesar 27. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu sebesar 27-45 dengan rata-rata (mean) aktual sebesar 37,72. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemanfaatan teknologi informasi yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi.

e. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 5-25 dengan rata-rata (mean) teoritis sebesar 15. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu sebesar 13-25

dengan rata-rata (mean) aktual sebesar 20,93. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi.

f. Akuntabilitas

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 6-30 dengan rata-rata (mean) teoritis sebesar 18. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu sebesar 18-30 dengan rata-rata (mean) aktual sebesar 24,62. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata akuntabilitas yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi.

g. Transparansi

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa transparansi memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 8-40 dengan rata-rata (mean) teoritis sebesar 24. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu sebesar 24-40 dengan rata-rata (mean) aktual sebesar 31,52. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata transparansi yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi.

#### h. Kualitas Pelaporan Keuangan

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 11-55 dengan rata-rata (mean) teoritis sebesar 33. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu sebesar 34-55 dengan rata-rata (mean) aktual sebesar 45,83. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelaporan keuangan yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi.

### 3. Uji Validitas

Berikut adalah hasil dari uji validitas item pertanyaan variabel independen dan variabel dependen antara lain :

**Tabel 4.5**  
**Uji Validitas Inventarisasi Aset**

<b>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</b>	<b>Factor Loading</b>	
0,859 > 0,5	Inventarisasi Aset 1	0,817
	Inventarisasi Aset 2	0,532
	Inventarisasi Aset 3	0,814
	Inventarisasi Aset 4	0,800
	Inventarisasi Aset 5	0,860
	Inventarisasi Aset 6	0,835
	Inventarisasi Aset 7	0,824

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 4.5 menunjukkan hasil bahwa variabel independen yaitu Inventarisasi Aset memiliki nilai *KMO and Bartlett's test* sebesar 0,859 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,5 dan *factor loading* masing-masing item lebih dari 0,5 maka pernyataan variabel Inventarisasi Aset dikatakan valid.

**Tabel 4.6**  
**Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal**

<b>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</b>	<b>Factor Loading</b>	
0,823 > 0,5	Sistem Pengendalian Internal 1	0,739
	Sistem Pengendalian Internal 2	0,672
	Sistem Pengendalian Internal 3	0,603
	Sistem Pengendalian Internal 4	0,723
	Sistem Pengendalian Internal 5	0,747
	Sistem Pengendalian Internal 6	0,749
	Sistem Pengendalian Internal 7	0,740
	Sistem Pengendalian Internal 8	0,621

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 4.6 menunjukkan hasil bahwa variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai *KMO and Bartlett's test* sebesar 0,823 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,5 dan *factor loading* masing-masing item lebih dari 0,5 maka item pernyataan variabel Sistem Pengendalian Internal dikatakan valid.

**Tabel 4.7**  
**Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia**

<b>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</b>	<b>Factor Loading</b>	
0,863 > 0,5	Kompetensi Sumber Daya Manusia 1	0,676
	Kompetensi Sumber Daya Manusia 2	0,728
	Kompetensi Sumber Daya Manusia 3	0,769
	Kompetensi Sumber Daya Manusia 4	0,879
	Kompetensi Sumber Daya Manusia 5	0,842
	Kompetensi Sumber Daya Manusia 6	0,852
	Kompetensi Sumber Daya Manusia 7	0,810
	Kompetensi Sumber Daya Manusia 8	0,812

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 4.7 menunjukkan hasil bahwa variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai *KMO and Bartlett's test* sebesar 0,863 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,5 dan *factor loading* masing-masing item lebih dari 0,5 maka item pernyataan variabel

Kompetensi Sumber Daya Manusia dikatakan valid.

**Tabel 4.8**  
**Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi**

<b>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</b>	<b>Factor Loading</b>	
0,828 > 0,5	Pemanfaatan Teknologi Informasi 1	0,711
	Pemanfaatan Teknologi Informasi 2	0,785
	Pemanfaatan Teknologi Informasi 3	0,800
	Pemanfaatan Teknologi Informasi 4	0,770
	Pemanfaatan Teknologi Informasi 5	0,697
	Pemanfaatan Teknologi Informasi 6	0,641
	Pemanfaatan Teknologi Informasi 7	0,634
	Pemanfaatan Teknologi Informasi 8	0,567
	Pemanfaatan Teknologi Informasi 9	0,644

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 4.8 menunjukkan hasil bahwa variabel independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai *KMO and Bartlett's test* sebesar 0,828 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,5 dan *factor loading* masing-masing item lebih dari 0,5 maka item pernyataan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dikatakan valid.

**Tabel 4.9**  
**Uji Validitas Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan**

<b>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</b>	<b>Factor Loading</b>	
0,797 > 0,5	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan 1	0,868
	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan 2	0,858
	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan 3	0,874

	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan 4	0,752
	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan 5	0,760

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 4.9 menunjukkan hasil bahwa variabel independen yaitu Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai *KMO and Bartlett's test* sebesar 0,797 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,5 dan *factor loading* masing-masing item lebih dari 0,5 maka item pernyataan variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dikatakan valid.

**Tabel 4.10**  
**Uji Validitas Akuntabilitas**

<b>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</b>	<b>Factor Loading</b>	
0,715 > 0,5	Akuntabilitas 1	,689
	Akuntabilitas 2	,739
	Akuntabilitas 3	,722
	Akuntabilitas 4	,681
	Akuntabilitas 5	,636
	Akuntabilitas 6	,676

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 4.10 menunjukkan hasil bahwa variabel independen yaitu Akuntabilitas memiliki nilai *KMO and Bartlett's test* sebesar 0,715 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,5 dan *factor loading* masing-masing item lebih dari 0,5 maka item pernyataan variabel Akuntabilitas dikatakan valid.

**Tabel 4.11**  
**Uji Validitas Transparansi**

<b>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</b>	<b>Factor Loading</b>	
0,862 > 0,5	Transparansi 1	,647
	Transparansi 2	,584
	Transparansi 3	,740
	Transparansi 4	,699
	Transparansi 5	,744
	Transparansi 6	,758
	Transparansi 7	,776
	Transparansi 8	,702

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 4.11 menunjukkan hasil bahwa variabel independen yaitu Transparansi memiliki nilai *KMO and Bartlett's test* sebesar 0,862 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,5 dan *factor loading* masing-masing item lebih dari 0,5 maka item pernyataan variabel Transparansi dikatakan valid.

**Tabel 4.12**  
**Uji Validitas Kualitas Pelaporan Keuangan**

<b>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</b>	<b>Factor Loading</b>	
0,900 > 0,5	Kualitas Pelaporan Keuangan 1	,714
	Kualitas Pelaporan Keuangan 2	,769
	Kualitas Pelaporan Keuangan 3	,781
	Kualitas Pelaporan Keuangan 4	,798
	Kualitas Pelaporan Keuangan 5	,786
	Kualitas Pelaporan Keuangan 6	,813
	Kualitas Pelaporan Keuangan 7	,649
	Kualitas Pelaporan Keuangan 8	,769
	Kualitas Pelaporan Keuangan 9	,802
	Kualitas Pelaporan Keuangan 10	,846
	Kualitas Pelaporan Keuangan 11	,765

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 4.12 menunjukkan hasil bahwa variabel dependen yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan memiliki nilai *KMO and Bartlett's test* sebesar 0,900 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,5 dan *factor loading* masing-

masing item lebih dari 0,5 maka item pernyataan variabel Kualitas Pelaporan Keuangan dikatakan valid.

#### 4. Uji Reliabilitas

Berikut merupakan hasil uji reliabilitas yang dapat dilihat pada tabel 4.13 :

**Tabel 4.13**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Inventarisasi Aset	0,850
Sistem Pengendalian Internal	0,848
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,916
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,863
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	0,881
Akuntabilitas	0,769
Transparansi	0,845
Kualitas Pelaporan Keuangan	0,930

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel diatas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan delapan variabel dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang cukup tinggi.

#### 5. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dari data yang digunakan sebagai berikut :

##### a. Uji Normalitas

Berikut merupakan hasil uji normalitas :

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.058

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel 4.14 uji *kolmogorov-smirnov* dengan nilai

signifikansi sebesar  $0,058 > \alpha 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini dikatakan berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinearitas**

Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas :

**Tabel 4.15**  
**Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Inventarisasi Aset	,700	1,429
	Sistem Pengendalian Internal	,434	2,305
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,694	1,440
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,515	1,943
	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	,441	2,268
	Akuntabilitas	,309	3,232
	Transparansi	,504	1,983

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan tabel 4.15 uji multikolinearitas menjelaskan bahwa data yang ada pada masing-masing variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil ini dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* secara keseluruhan  $< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,1$  maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena multikolinearitas.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas :

**Tabel 4.16**  
**Uji Heteroskedastisitas**

	Sig.
1 (Constant)	2,096
Inventarisasi Aset	,102
Sistem Pengendalian Internal	,965
Kompetensi Sumber Daya Manusia	,217
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,932
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	,647
Akuntabilitas	,266
Transparansi	,477

Sumber : Output *SPSS V.15*

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikansi secara keseluruhan variabel lebih besar dari 0,05 maka, data yang terdapat dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak terkena heteroskedastisitas.

## **B. Uji Hipotesis (Hasil Penelitian)**

### **1. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji-F)**

Berikut merupakan hasil uji-*F* antara lain :

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji-F**

Model	Sig.
1 Regression Residual Total	.000(a)

Sumber : Output *SPSS V.15*

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $F$   $0,000 < \alpha$   $0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

## 2. Uji Koefisien Dterminasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Berikut merupakan hasil uji *Adjusted R<sup>2</sup>* antara lain :

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji *Adjusted R<sup>2</sup>***

Model	Adjusted R Square
1	.431

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,431. Hal ini berarti 43,1% variasi dari variabel kualitas pelaporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu inventarisasi aset, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi. Sisanya 56,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

## 3. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji *t*)

Berikut merupakan hasil uji *t* antara lain :

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji *t***

	B	Sig.
1 (Constant)	8,093	.009
Inventarisasi Aset	.063	.487
Sistem Pengendalian Internal	.259	.024
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.183	.005
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.099	.034
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	.569	.001
Akuntabilitas	.009	.957
Transparansi	.180	.049

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan persamaan regresi adalah:

$$Y = 8,093 + 0,063 X_1 + 0,259 X_2 + 0,183 X_3 + 0,099 X_4 + 0,569 X_5 + 0,009 X_6 + 0,180 X_7 + e.$$

Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

**a. Uji Hipotesis 1 ( $H_1$ )**

Berdasarkan tabel di atas variabel inventarisasi aset memiliki nilai signifikansi  $0,487 > \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,063. Maka dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak.

**b. Uji Hipotesis 2 ( $H_2$ )**

Berdasarkan tabel di atas variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi  $0,024 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,259. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal

ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima.

**c. Uji Hipotesis 3 ( $H_3$ )**

Berdasarkan tabel di atas variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi  $0,005 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,183. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima.

**d. Uji Hipotesis 4 ( $H_4$ )**

Berdasarkan tabel di atas variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi  $0,034 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,099. Maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima.

**e. Uji Hipotesis 5 ( $H_5$ )**

Berdasarkan tabel di atas variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai signifikansi  $0,001 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,569. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima ( $H_5$ ) diterima.

**f. Uji Hipotesis 6 ( $H_6$ )**

Berdasarkan tabel di atas variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikansi  $0,957 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,009.

Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima ( $H_6$ ) ditolak.

**g. Uji Hipotesis 7 ( $H_7$ )**

Berdasarkan tabel di atas variabel transparansi memiliki nilai signifikansi  $0,049 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,180. Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima ( $H_7$ ) diterima.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil dari hipotesis pertama ( $H_1$ ) menunjukkan bahwa variabel inventarisasi aset tetap milik daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut maka inventarisasi aset tetap milik daerah bukan termasuk salah satu faktor yang menentukan kualitasnya suatu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jadi apabila inventarisasi aset tetap sudah berjalan dengan baik maka belum tentu pelaporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.

Hal ini disebabkan karena pemerintah atau pengurus aset pada setiap OPD belum melakukan pencatatan dan pelaporan aset secara teratur. Sedangkan inventarisasi yang baik melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik

daerah dalam unit pemakaian secara teratur. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan teori *stewardship* yang menjelaskan kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan melakukan inventarisasi aset tetap milik daerah, aset yang dimiliki suatu daerah lebih jelas dan akurat bentuk serta keberadaanya, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrianti (2016) yang menyatakan bahwa variabel inventaris tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan.

## **2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil dari hipotesis kedua ( $H_2$ ) menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut maka SPI termasuk salah satu faktor yang menentukan berkualitasnya suatu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian internal meliputi berbagai alat manajemen untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan pelaporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan

efektivitas operasi-operasi pemerintah. Pengendalian internal memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan dalam organisasi pemerintah. Pengukuran variabel sistem pengendalian intern diukur dengan empat indikator yaitu lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan dengan total sebanyak delapan pertanyaan.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menjelaskan *Steward* berkomitmen dengan organisasinya agar termotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan dan juga dapat memberikan kepuasan terhadap kepentingan *stakeholder*. Dengan diterapkannya sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi merupakan cara untuk adanya pengarahan, pengawasan, dan pengukuran suatu sumber daya sebuah organisasi. Jika sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi sudah berjalan dengan baik maka hal ini sangat membantu dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan Armel (2017) yang membuktikan bahwa SPI berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapitri, dkk (2015) yang membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Begitupun yang dilakukan oleh Widari (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil dari hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sehingga sejalan dengan semakin berkompetennya SDM yang dimiliki maka pelaporan keuangan juga semakin berkualitas. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan pelaporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan pelaporan keuangan agar terciptanya pelaporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Andini dan Yusrawati (2015), Yuliani dan Agustini (2016) dan Armel (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menjelaskan terdapat dua kelompok yaitu *principal* dan *steward* yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sesuai apa yang mereka inginkan. *Steward* menerima pegawainya dilihat dari potensi sumber daya manusia dalam organisasinya agar dapat memaksimalkan *stakeholder benefit*. Adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menyusun pelaporan keuangan

yang berkualitas sehingga dapat berfungsi secara baik dan dapat mencapai tujuan organisasi.

#### **4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil dari hipotesis keempat ( $H_4$ ) menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin baik kualitas pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan. Penggunaan teknologi informasi di OPD Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sangat diperlukan dalam kinerja operasional dan penyusunan pelaporan keuangan.

Dalam penjelasan peraturan pemerintah No.56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Primayana, dkk (2014), Yuliani dan Agustini (2016) dan Armel (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menjelaskan terdapat dua kelompok yaitu *principal* dan *steward* yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sesuai apa yang mereka inginkan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi pemerintah sebagai *steward* dapat memberikan informasi dengan mudah kepada *principal* yaitu memaksimalkan penggunaan internet, *principal* akan lebih mudah mengakses informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah.

#### **5. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman SAP seorang pegawai OPD, maka semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang disusun.

Jika dianalisis dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh pegawai OPD, maka menunjukkan bahwa pegawai bagian akuntansi dan keuangan sudah mendukung dan diimbangi dengan pemahaman pegawai tentang SAP yang sudah sebagian besar memahaminya. Oleh karena itu, dalam penyusunan pelaporan keuangan tidak mengalami masalah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Wiraputra, dkk (2014) dan Ningtyas (2015) dengan hasil penelitian yaitu pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini juga sesuai dengan teori *stewardship* yang

memiliki asumsi bahwa pelayan masyarakat dalam hal ini yaitu pejabat OPD harus bertindak penuh tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugasnya, maka pejabat OPD tersebut harus memahami standar akuntansi pemerintahan yang dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka pemahaman standar akuntansi pemerintah oleh pegawai pemerintah merupakan sebuah syarat atau keharusan yang bersifat mutlak, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada suatu pemerintahan.

#### **6. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Berdasarkan hasil dari hipotesis keenam ( $H_6$ ) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, meningkatnya tingkat akuntabilitas tidak dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini disebabkan tingkat akuntabilitas dalam OPD di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal dikarenakan dalam tiap dinas atau badan belum terdapat peraturan atau regulasi yang mewajibkan suatu dinas atau badan tersebut untuk melaporkan pertanggung jawabannya dalam hal ini pelaporan keuangan pemerintah daerah kepada masyarakat. Akuntabilitas yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam hal ini adalah tingkat pertanggungjawaban pejabat OPD yang menyusun pelaporan keuangan. Dalam hal ini, akuntabilitas sangat tergantung kepada organisasi serta sifat

keputusan yang dibuat dan diambil.

Berdasarkan penelitian ini pada OPD di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan tidak ada pengaruh antara akuntabilitas dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dugaan awal bahwa akuntabilitas yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dibuktikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu hasil penelitian dari Ermino (2017). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *stewardship* yang memiliki pandangan bahwa pelayan masyarakat dalam hal ini yaitu pejabat OPD harus bertindak penuh tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### **7. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Berdasarkan hasil dari hipotesis ketujuh ( $H_7$ ) menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Meningkatnya tingkat transparansi memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Transparansi dalam penelitian ini diukur dari sejauh mana pihak pejabat OPD melakukan publikasi pelaporan keuangan serta menjalankan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

Penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang memiliki asumsi bahwa pejabat OPD sebagai pelayan masyarakat harus menjunjung tinggi kejujuran. Sedangkan kejujuran merupakan acuan dari prinsip transparansi

itu sendiri. Suatu pelaporan keuangan dianggap transparan jika informasi yang ada dalam pelaporan keuangan tersebut disajikan secara terbuka. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswadi (2014) yang memperoleh hasil transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

